

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 8 Juli 2020

*Sumber Pengambilan Dokumen*

A	Kabupaten Sumedang	
1	BPK Temukan Ketidaksesuaian Pekerjaan Peningkatan Jalan: Kerugian Negara Capai Rp 3,9 Miliar	<i>Galamedia/Hal. 4</i>

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : BPK Temukan Ketidaksesuaian Pekerjaan Peningkatan Jalan: Kerugian Negara Capai Rp 3,9 Miliar

Entitas / Cakupan : Kabupaten Sumedang

Sumber / Hal : Galamedia/Hal.

Edisi : Rabu, 8 Juli 2020

## BPK Temukan Ketidaksesuaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kerugian Negara Capai Rp 3,9 Miliar

### SUMEDANG, (GM).-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menemukan kerugian negara pada 12 paket pekerjaan peningkatan jalan tahun anggaran 2019, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Sumedang, senilai lebih dari Rp 3,9 miliar.

Berdasarkan data yang diperoleh "GM", temuan kerugian negara itu didasarkan atas hasil pemeriksaan BPK secara uji petik, yang menemukan ketidaksesuaian spesifikasi beton besar serta kurang volume pada sejumlah paket peningkatan jalan tersebut.

Temuan kerugian negara oleh BPK sebesar itu mendapat tanggapan dari Ketua Gapensi Kab. Sumedang, Rully Krisna Prayoga. Menurutnya, setiap temuan BPK atas hasil pemeriksaan atau uji petik di lapangan atas suatu hasil pekerjaan proyek yang dibiayai oleh keuangan negara selalu terjadi. Hanya saja temuan kerugian negara atau kelebihan bayar tidak sebesar sekarang.

"Tahun ini, nilai kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK cukup fantastis, yaitu hampir Rp 4 miliar," kata Rully melalui sambuangan Whatsapp, Selasa (7/7).

Menurutnya dari kabar yang beredar, beberapa rekanan (penyedia jasa konstruksi) diwajibkan untuk menyetor kelebihan bayar ke kas daerah. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah bahkan hingga mendekati Rp 1 miliar.

Oleh karena itu, Rully mengajak

semua pihak untuk mengambil pembelajaran dari temuan BPK itu agar kejadian serupa tidak terulang kembali di tahun mendatang. Pasalnya, semua yang terlibat dalam pekerjaan yang menggunakan keuangan negara pasti bakal dipertemukan lagi dengan BPK.

"Untuk itu, mari kita jadikan masalah ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, terutama

muan BPK atas hasil pemeriksaan secara uji petik pada 12 paket pekerjaan senilai lebih dari Rp 3,9 miliar. "Saat ini kami bersama rekanan terkait, tengah merespons dan mencermati hasil temuan BPK itu," ujarnya.

Paket pekerjaan dan pelaksana atau perusahaan yang dinyatakan kelebihan bayar (temuan kerugian negara) akibat ketidaksesuaian

”

Saat ini kami bersama rekanan terkait, tengah merespons dan mencermati hasil temuan BPK itu

”



**Sony Nurgahara**

Plt. Dinas PUPR  
Kab. Sumedang

rekanan dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) selaku pengguna jasa. Dan tentunya karena sudah tertuang dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK, maka setiap rekanan atau perusahaan yang memiliki kelebihan bayar, memiliki kewajiban untuk segera menyetorkannya ke kas daerah," katanya.

Sebelumnya, Plt. Dinas PUPR Kab. Sumedang, Rd. Sony Nurgahara membenarkan terjadinya te-

sesifikasi oleh BPK, di antaranya peningkatan Jalan Ujungjaya-Conggeang (CV Ken) dengan kelebihan bayar Rp 631 juta dari nilai paket pekerjaan Rp 1,77 miliar.

Sedangkan paket pekerjaan kurang volume di antaranya pekerjaan peningkatan Jalan Cikaramas Jingsang (CV NMS) dengan kerugian negara Rp 110 juta dari nilai paket pekerjaan Rp 1,96 miliar. (B.108)\*\*